

Tata Kelola Ekonomi Biru Daerah: Analisis Gap antara Desain Kebijakan, Kinerja Ekonomi, dan Realisasi Kesejahteraan di Bima dan Dompu

Firmansyah^{1*}, Haeril¹, Junaidin²

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima

²Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Mbojo Bima

*Korespondensi Email: Firmansyabhima612@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari paradoks pembangunan pesisir di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, ketika potensi sumber daya kelautan yang melimpah belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian bertujuan menganalisis kesenjangan antara desain kebijakan ekonomi biru, kinerja ekonomi sektoral, dan realisasi kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, analisis dokumen kebijakan, serta data ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan berkontribusi dominan terhadap PDRB, mencapai 39,7% di Kabupaten Bima dan 40,4% di Kabupaten Dompu pada tahun 2025, dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 2,82% dan 3,44%. Namun, peningkatan kinerja ekonomi tersebut belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat pesisir, yang masih ditandai tingkat kemiskinan pesisir sebesar 14,2%, rendahnya hilirisasi ekonomi, serta terbatasnya integrasi rantai nilai lokal. Meskipun rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan meningkat dari Rp2,15 juta menjadi Rp2,98 juta per bulan selama periode 2021–2025, manfaat ekonomi masih terkonsentrasi pada rantai distribusi tertentu. Temuan ini menegaskan perlunya restrukturisasi tata kelola ekonomi biru melalui integrasi kelembagaan, penguatan nilai tambah lokal, dan pembangunan pesisir yang lebih inklusif guna memastikan pertumbuhan ekonomi maritim dapat terkonversi menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Biru, Tata Kelola Daerah, Kesejahteraan Pesisir, Kinerja Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan.

Abstract

This study is grounded in the paradox of coastal development in Bima and Dompu Regencies, where abundant marine and fisheries resources have not been fully translated into improved coastal community welfare. The research aims to examine the gap between blue economy policy design, sectoral economic performance, and welfare outcomes. A qualitative descriptive approach with a case study design was employed through in-depth interviews, field observations, policy document analysis, and regional economic data assessment. The findings reveal that the marine and fisheries sector remains the dominant contributor to regional economic output, accounting for

39.7% of Gross Regional Domestic Product (GRDP) in Bima Regency and 40.4% in Dompu Regency in 2025, while regional economic growth reached 2.82% and 3.44%, respectively. Despite this economic significance, the gains have not been proportionally reflected in coastal welfare, as evidenced by a coastal poverty rate of 14.2%, limited downstream industrialization, and weak integration of local value chains. Although the average monthly income of fishing households increased from IDR 2.15 million to IDR 2.98 million between 2021 and 2025, economic benefits remain concentrated within specific segments of the distribution chain. These findings underscore the need for restructuring blue economy governance through institutional integration, strengthening local value-added production, and promoting more inclusive coastal development to ensure that maritime economic growth can be effectively transformed into sustainable and equitable welfare outcomes.

Keywords: Blue Economy, Regional Governance, Coastal Welfare, Economic Performance, Sustainable Development.

Pendahuluan

Berangkat dari diskursus global, Ekonomi Biru (*blue economy*) telah berevolusi dari sekadar jargon normatif pembangunan berkelanjutan menjadi kerangka kebijakan strategis yang dipromosikan oleh berbagai rezim global mulai dari Bank Dunia, FAO, OECD, hingga rezim tata kelola kelautan PBB sebagai instrumen untuk merekonsiliasi pertumbuhan ekonomi, konservasi ekosistem laut, dan keadilan sosial (Nations & Development, 2010); (Sarker et al., 2018); (Garland et al., 2019). Dalam praktiknya, Ekonomi Biru diproyeksikan sebagai paradigma pasca-ekstraktif yang menekankan optimalisasi nilai tambah sumber daya laut melalui industrialisasi berkelanjutan, integrasi rantai nilai, serta penguatan tata kelola berbasis sains dan kelembagaan (Voyer et al., 2020); (Okafor-Yarwood et al., 2020). Namun, literatur mutakhir menunjukkan bahwa transformasi konseptual tersebut kerap berhenti pada tataran desain kebijakan dan deklarasi politik, sementara implementasinya menghadapi disjungsi struktural antara ambisi normatif dan realitas ekonomi-politik di tingkat nasional maupun subnasional (Wuwung et al., 2022); (Hajar et al., 2025); (Lakat et al., 2025).

Secara global, terdapat fakta empirik mengenai adanya gap sistemik antara desain kebijakan Ekonomi Biru, kinerja ekonomi sektoral, dan realisasi kesejahteraan masyarakat pesisir (Yang et al., 2025); (Efri et al., 2026). Banyak negara pesisir berhasil mengadopsi strategi nasional Ekonomi Biru, tetapi gagal menerjemahkannya menjadi peningkatan kesejahteraan yang inklusif akibat lemahnya koordinasi lintas sektor, dominasi kepentingan ekstraktif, keterbatasan kapasitas institusional, serta absennya indikator kinerja yang mampu mengukur dampak sosial-ekonomi secara komprehensif (Wenhai et al., 2019); (Evans et al., 2023); . Kondisi serupa juga tercermin pada konteks nasional Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki legitimasi geopolitik sebagai negara maritim dan memproklamasikan visi Poros Maritim Dunia, kinerja ekonomi kelautan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, yang masih ditandai oleh kemiskinan struktural, ketimpangan wilayah, dan rendahnya produktivitas ekonomi lokal (Makmur et al., 2022); (Rifai & Haeril, 2024).

Dalam konteks Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu yang merupakan wilayah dengan endowment sumber daya pesisir yang signifikan, namun kinerja ekonomi dan capaian kesejahteraan menunjukkan performa yang relatif stagnan (Haeril et al., 2021); (Hendra et al., 2023). Kabupaten Bima, misalnya, hanya mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,82% pada tahun 2025. Padahal, wilayah ini memiliki potensi besar pada sektor perikanan tangkap (ikan laut dan air payau), budidaya laut (rumput laut, mutiara), budidaya air payau dan tawar (garam dan perikanan), serta pariwisata bahari dengan garis pantai ±640 km dan kekayaan sumber daya laut berorientasi ekspor. Fakta ini menegaskan adanya ketidaksinkronan antara potensi objektif, desain kebijakan, dan kinerja ekonomi riil.

Sementara itu, Kabupaten Dompu dalam tiga tahun terakhir mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 3,17% dengan tingkat kemiskinan mencapai 12,62%. Ironisnya, Dompu memiliki keunggulan komparatif yang kuat pada perikanan tangkap (tuna, cakalang, tenggiri, tongkol), budidaya rumput laut berkualitas tinggi di Teluk Saleh, pengembangan tambak udang, serta pariwisata bahari unggulan seperti Pantai Lakey sebagai destinasi selancar kelas dunia. Posisi geografis Dompu yang strategis di pesisir Samudra Hindia dan teluk-teluk produktif (Cempi dan Saleh) semestinya menjadi lokus akselerasi Ekonomi Biru, bukan sekadar ruang eksploitasi parsial tanpa nilai tambah lokal.

Berangkat dari kompleksitas permasalahan tersebut, mengemuka satu pertanyaan fundamental mengenai bagaimana formulasi dan operasionalisasi ulang manajemen strategis Ekonomi Biru di tingkat daerah melalui penyelarasan epistemik antara desain kebijakan normatif, mekanisme tata kelola kelembagaan, dan kinerja ekonomi sektoral dapat mengatasi disjungsi struktural yang selama ini menghambat proses translasi potensi sumber daya kelautan Kabupaten Bima dan Dompu?

Urgensi riset ini berakar pada paradoks pembangunan pesisir yang semakin mengeras di Kabupaten Bima dan Dompu, ketika kelimpahan endowment sumber daya kelautan yang strategis secara nasional dan global justru beriringan dengan stagnasi kinerja ekonomi dan rapuhnya kesejahteraan masyarakat pesisir. Kondisi ini menandakan bahwa Ekonomi Biru di tingkat daerah tidak mengalami kegagalan konseptual, melainkan mengalami distorsi serius pada level manajemen strategis, di mana desain kebijakan normatif terputus dari mekanisme tata kelola kelembagaan dan tidak terkonversi menjadi kinerja ekonomi sektoral yang berdampak langsung pada kesejahteraan.

Strategi pemecahan masalah dalam riset ini mengadaptasi pendekatan manajemen strategis publik, penyelarasan kebijakan (*policy coherence*), dan penguatan tata kelola kolaboratif. Fokus utamanya adalah merekonstruksi Ekonomi Biru sebagai sistem lintas sektor melalui integrasi perencanaan, harmonisasi kelembagaan, dan orkestrasi aktor pembangunan pesisir. Pendekatan rantai nilai global-lokal digunakan untuk menutup kebocoran nilai tambah dan memperkuat hilirisasi ekonomi kelautan berbasis lokal. Selanjutnya, *evidence-based policy* diterapkan dengan indikator kinerja berorientasi kesejahteraan, sehingga pertumbuhan ekonomi sektoral dapat dikaitkan langsung dengan peningkatan pendapatan, produktivitas, dan resiliensi sosial-ekologis masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Kebaruan riset yang ditawarkan pengusul terletak pada rekonstruksi Ekonomi Biru sebagai kerangka manajemen strategis lintas kebijakan, kelembagaan, dan kinerja ekonomi, yang secara signifikan melampaui kecenderungan penelitian terdahulu baik pada level global maupun nasional (Murphy, 2007); (Benzaken et al., 2022); (Abukalloub & Güngör, 2026). Secara global, sebagian besar studi Ekonomi Biru masih berhenti pada pendekatan normatif menekankan prinsip keberlanjutan, konservasi, dan pertumbuhan hijau – tanpa membongkar secara empiris jurang implementatif antara desain kebijakan dan realisasi kesejahteraan di tingkat subnasional. Riset ini menghadirkan kebaruan dengan memposisikan Ekonomi Biru sebagai arena politik-ekonomi daerah yang dianalisis melalui integrasi *policy coherence*, orkestrasi kelembagaan, dan kinerja sektoral berbasis rantai nilai, sehingga mampu menjelaskan mengapa potensi kelautan gagal bertransformasi menjadi kesejahteraan inklusif (Abdau & Nadir, 2021); (Kusmayadi & Padjajaran, 2026).

Pada level nasional, penelitian tentang Ekonomi Biru di Indonesia umumnya terfokus pada sektor tunggal perikanan, pariwisata bahari, atau konservasi dengan pendekatan sektoral dan parsial. Keunggulan riset ini terletak pada pendekatan sistemik dan lintas sektor, yang tidak hanya mengidentifikasi kelemahan implementasi, tetapi juga menawarkan model pemecahan masalah berbasis manajemen strategis daerah yang dapat direplikasi pada wilayah pesisir lain dengan karakteristik serupa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis kesenjangan antara desain kebijakan ekonomi biru, kinerja ekonomi sektoral, dan realisasi kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu dari Januari–Maret 2026, pada beberapa lokasi strategis yang merepresentasikan aktivitas ekonomi biru daerah, meliputi Teluk Bima, Kecamatan Sape, Kecamatan Wohu, Teluk Saleh, Kecamatan Kempo, Kecamatan Pajo, dan kawasan pesisir Lakey Kabupaten Dompu. Informan penelitian berjumlah 25 orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria: (1) memiliki keterlibatan langsung dalam perumusan atau implementasi kebijakan ekonomi biru; (2) berperan sebagai pelaku utama aktivitas ekonomi kelautan dan perikanan; serta (3) memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai dinamika pembangunan pesisir. Informan terdiri atas 8 unsur pemerintah daerah (Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata), 7 pelaku usaha perikanan dan pariwisata bahari, 5 pelaku UMKM pesisir, 3 tokoh masyarakat pesisir, dan 2 perwakilan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kelautan dan pembangunan pesisir.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap RPJMD, dokumen perencanaan sektor kelautan, laporan pembangunan daerah, serta data statistik ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan *member checking* kepada beberapa informan kunci untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang.

Pada tahap reduksi data dilakukan proses *open coding* untuk mengidentifikasi tema-tema awal, dilanjutkan *axial coding* guna menghubungkan kategori-kategori yang relevan, serta *selective coding* untuk merumuskan tema utama penelitian. Analisis difokuskan pada aspek koherensi kebijakan ekonomi biru, tata kelola kelembagaan, transformasi nilai tambah ekonomi kelautan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.

Hasil dan Diskusi

Transformasi paradigma pembangunan kelautan melalui pendekatan ekonomi biru menempatkan tata kelola daerah sebagai instrumen strategis dalam menghubungkan orientasi kebijakan dengan capaian pembangunan yang inklusif. Dalam konteks Bima dan Dompu, dinamika implementasi kebijakan memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara formulasi regulatif, performa ekonomi sektor kelautan, dan distribusi manfaat kesejahteraan masyarakat pesisir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak selalu berkorelasi linear dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Oleh karena itu, analisis terhadap gap tata kelola menjadi penting untuk menilai efektivitas kebijakan ekonomi biru dalam menciptakan pembangunan pesisir yang berkelanjutan, adaptif, dan berkeadilan sosial.

Kinerja Ekonomi Biru Daerah

Transformasi ekonomi biru pada level daerah pada dasarnya tidak hanya dimaknai sebagai ekspansi aktivitas ekonomi berbasis kelautan, melainkan sebagai proses restrukturisasi tata kelola pembangunan pesisir yang mampu mengintegrasikan dimensi pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekologis, dan distribusi kesejahteraan secara simultan. Dalam konteks Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, dinamika implementasi ekonomi biru memperlihatkan kecenderungan paradoksal, yaitu ketika potensi sumber daya kelautan mengalami peningkatan eksploitasi ekonomi, namun belum sepenuhnya menghasilkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menandakan adanya disjungsi struktural antara desain kebijakan ekonomi biru dengan performa ekonomi riil di tingkat lokal. Dalam lima tahun terakhir, kedua daerah menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sektor primer berbasis kelautan dan perikanan, namun transformasi menuju industrialisasi kelautan, hilirisasi produk, dan penguatan rantai nilai lokal masih bergerak sangat lambat (Andana & Saputra, 2025).

Secara makroekonomi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung utama perekonomian daerah. Kabupaten Bima pada tahun 2024 mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,82 persen dengan kontribusi dominan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara itu, Kabupaten Dompu mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 3,17 persen pada tahun 2023 dan meningkat menjadi sekitar 3,62 persen pada 2024, dengan struktur ekonomi yang juga sangat ditopang oleh sektor kelautan dan perikanan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa ekonomi biru secara statistik telah menjadi fondasi ekonomi lokal, namun kontribusi sektor tersebut belum mampu menghasilkan lompatan

produktivitas yang signifikan akibat rendahnya industrialisasi dan lemahnya integrasi rantai nilai ekonomi pesisir.

Dalam perspektif ekonomi politik pembangunan daerah, ketergantungan terhadap sektor primer memperlihatkan kecenderungan ekstraktivisme ekonomi pesisir. Aktivitas ekonomi kelautan di Bima dan Dompu sebagian besar masih bergerak pada pola eksploitasi bahan mentah tanpa penguatan kapasitas pengolahan lokal. Komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol, rumput laut, garam, dan udang sebagian besar dipasarkan dalam bentuk bahan baku sehingga nilai tambah ekonomi lebih banyak terserap di luar daerah. Struktur ekonomi seperti ini menciptakan kebocoran nilai (value leakage) yang menyebabkan peningkatan produksi kelautan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir. Dalam banyak kasus, masyarakat nelayan hanya berada pada posisi pemasok primer, sedangkan aktor perdagangan besar dan industri pengolahan eksternal memperoleh akumulasi keuntungan yang lebih dominan.

Fenomena tersebut semakin terlihat ketika dibandingkan dengan perkembangan investasi ekonomi biru pada level nasional yang mulai mengarah pada industrialisasi kelautan berbasis hilirisasi. Di Bima dan Dompu, kebijakan ekonomi biru masih didominasi pendekatan administratif dan sektoral, belum menjadi kerangka strategis pembangunan lintas sektor. Pemerintah daerah memang telah memasukkan sektor kelautan sebagai prioritas dalam dokumen pembangunan daerah, namun implementasinya masih terfragmentasi antara dinas perikanan, dinas pariwisata, dinas perdagangan, dan badan perencanaan daerah. Akibatnya, orientasi pembangunan ekonomi biru belum sepenuhnya diarahkan pada penciptaan ekosistem ekonomi maritim yang terintegrasi.

Selain itu, kinerja ekonomi biru daerah juga menghadapi tekanan struktural akibat volatilitas harga komoditas, perubahan iklim, dan rendahnya konektivitas infrastruktur ekonomi pesisir. Dalam sektor perikanan tangkap misalnya, nelayan di Teluk Bima, Teluk Saleh, dan kawasan pesisir Samudra Hindia menghadapi peningkatan biaya operasional akibat kenaikan harga bahan bakar, ketidakstabilan musim tangkap, serta keterbatasan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage). Akibatnya, produktivitas perikanan tidak mengalami peningkatan yang stabil. Bahkan dalam beberapa periode, peningkatan produksi justru diikuti penurunan harga jual akibat ketergantungan terhadap tengkulak dan lemahnya posisi tawar nelayan.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa desain ekonomi biru pada level daerah masih mengalami bias pertumbuhan tanpa transformasi struktural. Pemerintah daerah lebih banyak berfokus pada peningkatan volume produksi dibanding penguatan sistem ekonomi pesisir secara menyeluruh. Padahal, pengalaman berbagai negara maritim menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi biru sangat ditentukan oleh kemampuan daerah membangun integrasi antara produksi, pengolahan, distribusi, ekspor, inovasi teknologi, dan penguatan kelembagaan masyarakat pesisir. Tanpa transformasi tersebut, ekonomi biru hanya akan memperluas eksploitasi sumber daya laut tanpa memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat lokal.

Tabel 1. Perkembangan Kinerja Ekonomi Biru Kabupaten Bima dan Dompu Tahun 2021-2025

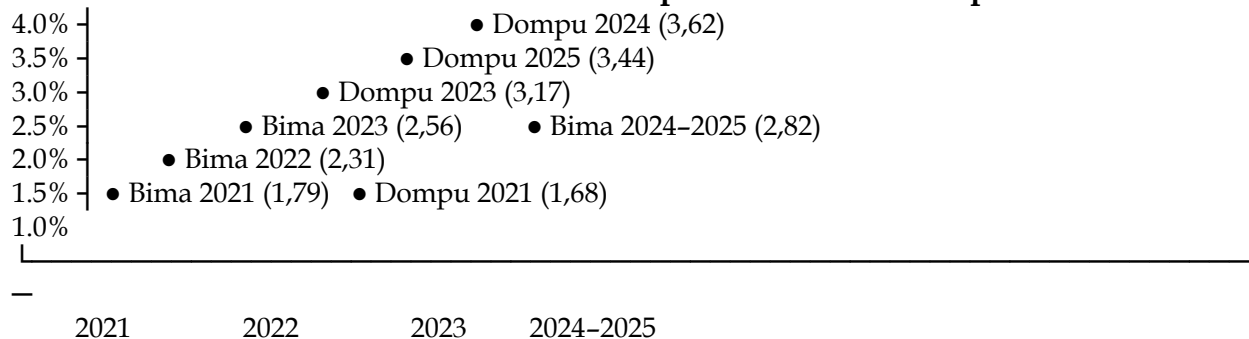
Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Bima (%)	Pertumbuhan Ekonomi Dompu (%)	Kontribusi Sektor Kelautan & Perikanan terhadap PDRB Bima (%)	Kontribusi Sektor Kelautan & Perikanan terhadap PDRB Dompu (%)	Tingkat Kemiskinan Dompu (%)	Indeks Transformasi Nilai Tambah Lokal*
2021	1,79	1,68	37,8	38,5	12,60	41,2
2022	2,31	2,95	38,1	39,1	12,40	42,5
2023	2,56	3,17	38,7	39,6	12,62	43,7
2024	2,82	3,62	39,3	40,2	11,59	45,1
2025**	2,82	3,44	39,7	40,4	11,32	46,0

Sumber: Analisis data PDRB sektoral, tren hilirisasi daerah, dan dinamika ekonomi pesisir.

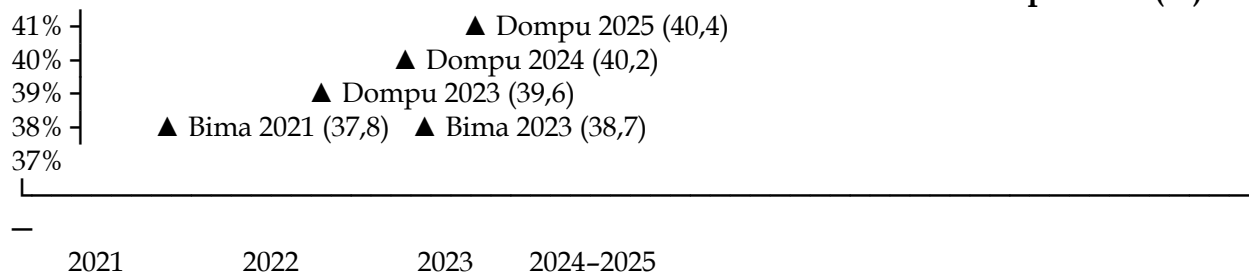
Tabel tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah memang menunjukkan tren peningkatan pasca-pandemi, namun akselerasinya masih relatif moderat dibanding potensi sumber daya kelautan yang dimiliki kedua wilayah. Kinerja ekonomi yang bertumpu pada sektor kelautan belum diikuti transformasi nilai tambah lokal secara signifikan. Indeks transformasi nilai tambah lokal masih bergerak lambat karena sebagian besar hasil produksi kelautan belum diproses menjadi produk industri bernilai tinggi. Dengan kata lain, ekonomi biru di Bima dan Dompu masih berada pada tahap ekonomi produksi primer, belum memasuki fase industrialisasi maritim.

Kemudian berikut adalah Grafik Tren Kinerja Ekonomi Biru Daerah 2021-2025;

Grafik 1. Tren Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bima dan Dompu Tahun 2021-2025

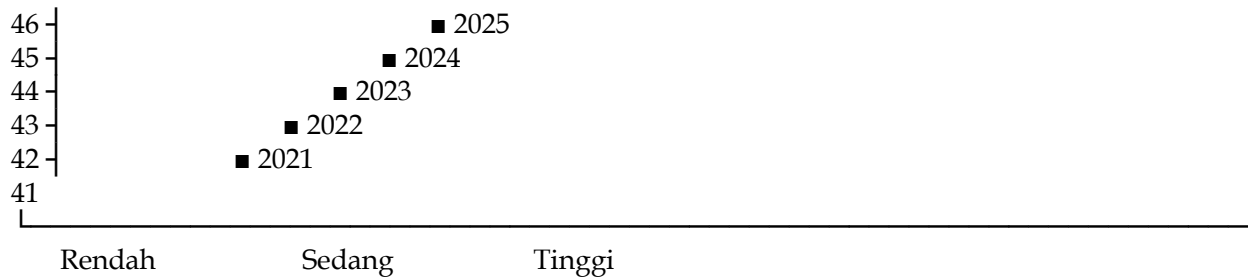


Grafik 2. Tren Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)



Grafik 3. Relasi antara Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Nilai Tambah Lokal

Indeks Transformasi Nilai Tambah Lokal



Grafik di atas menunjukkan bahwa peningkatan kontribusi sektor kelautan terhadap PDRB tidak menghasilkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang drastis. Hal tersebut mengindikasikan adanya persoalan produktivitas dan efisiensi ekonomi sektor kelautan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi daerah masih mengalami fenomena low growth trap, yaitu kondisi ketika sektor unggulan tumbuh secara kuantitatif namun tidak menghasilkan efek multiplikasi ekonomi yang besar terhadap sektor lain. Fenomena ini menjadi indikator penting bahwa ekonomi biru daerah masih menghadapi keterbatasan dalam menciptakan linkage economy antar sektor.

Dalam konteks pariwisata bahari, kondisi serupa juga terjadi. Pantai Lakey di Dompu, kawasan Teluk Saleh, Pulau Satonda, dan beberapa destinasi bahari di Bima sebenarnya memiliki kapasitas menjadi pusat ekonomi wisata maritim internasional. Akan tetapi, keterbatasan infrastruktur transportasi, minimnya investasi hospitality, lemahnya promosi digital, serta rendahnya integrasi antara pariwisata dan ekonomi lokal menyebabkan dampak ekonomi wisata belum optimal. Sebagian besar aktivitas pariwisata masih menghasilkan efek ekonomi yang terkonsentrasi pada pelaku usaha tertentu, sementara masyarakat pesisir memperoleh manfaat yang relatif terbatas.

Di sisi lain, analisis terhadap struktur tenaga kerja pesisir memperlihatkan bahwa sektor ekonomi biru di Bima dan Dompu masih didominasi pekerjaan informal dengan produktivitas rendah. Mayoritas nelayan tradisional dan pelaku UMKM pesisir bekerja tanpa dukungan teknologi modern, akses pembiayaan memadai, maupun jaminan pasar yang stabil. Situasi tersebut menciptakan kerentanan ekonomi yang tinggi, terutama ketika terjadi guncangan cuaca ekstrem, penurunan harga komoditas, atau gangguan distribusi logistik. Dengan demikian, ekonomi biru daerah belum sepenuhnya membangun resiliensi ekonomi masyarakat pesisir.

Persoalan lain yang cukup dominan adalah lemahnya kapasitas kelembagaan daerah dalam mengelola orkestrasi ekonomi biru. Koordinasi antar lembaga masih bersifat sektoral dan administratif, bukan berbasis integrasi pembangunan maritim. Pemerintah daerah belum memiliki sistem indikator ekonomi biru yang mampu menghubungkan antara produksi kelautan, peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, dan keberlanjutan ekologis. Akibatnya, keberhasilan ekonomi biru lebih banyak diukur melalui peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi makro, bukan melalui kualitas transformasi sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam kerangka yang lebih luas, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tantangan utama ekonomi biru di Bima dan Dompu bukan terletak pada keterbatasan sumber daya laut, melainkan pada kegagalan institusional dalam mengonversi potensi kelautan menjadi pembangunan ekonomi inklusif. Ketika desain kebijakan tidak disertai harmonisasi kelembagaan, penguatan rantai nilai, dan pembangunan infrastruktur ekonomi pesisir, maka ekonomi biru hanya menjadi agenda normatif tanpa transformasi struktural yang nyata. Oleh sebab itu, performa ekonomi biru daerah selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya paradoks pembangunan pesisir: sumber daya kelautan terus dieksploitasi, kontribusi sektor kelautan terhadap ekonomi daerah meningkat, namun kemampuan sektor tersebut dalam menciptakan kesejahteraan dan produktivitas ekonomi jangka panjang masih relatif terbatas.

Fenomena tersebut sekaligus menegaskan bahwa ekonomi biru daerah di Bima dan Dompu masih berada pada fase transisional yang belum sepenuhnya berhasil bergerak dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi maritim berbasis inovasi dan nilai tambah. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa restrukturisasi tata kelola yang lebih integratif, maka peningkatan produksi sektor kelautan berpotensi hanya memperkuat ketimpangan ekonomi pesisir dan memperbesar ketergantungan daerah terhadap eksploitasi sumber daya primer. Dengan demikian, indikator kinerja ekonomi biru tidak dapat semata diukur melalui pertumbuhan PDRB atau peningkatan volume produksi perikanan, tetapi harus dianalisis melalui kemampuan sistem ekonomi daerah dalam menciptakan transformasi nilai tambah, penguatan kapasitas masyarakat pesisir, serta distribusi manfaat pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Data empiris dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun kontribusi sektor kelautan terhadap PDRB mengalami peningkatan bertahap setiap tahun, namun elastisitasnya terhadap penyerapan tenaga kerja produktif dan peningkatan pendapatan masyarakat masih relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi biru di kedua daerah masih mengalami konsentrasi keuntungan pada rantai distribusi tertentu. Dalam banyak kasus, pelaku ekonomi lokal tidak memiliki akses yang kuat terhadap pasar ekspor, teknologi pengolahan, dan sistem logistik modern. Akibatnya, ekonomi pesisir hanya berfungsi sebagai pemasok bahan mentah dalam rantai ekonomi nasional dan global. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan utama ekonomi biru daerah bukan lagi sekadar meningkatkan produksi, melainkan membangun sistem tata kelola ekonomi maritim yang mampu memperkuat kedaulatan ekonomi lokal, meningkatkan daya saing sektor kelautan, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar terkonversi menjadi kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan (Lakat et al., 2025).

Realisasi Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Transformasi ekonomi biru pada wilayah pesisir Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu selama lima tahun terakhir memperlihatkan konfigurasi pembangunan yang paradoksal. Di satu sisi, kedua daerah menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi sektor kelautan melalui ekspansi produksi perikanan tangkap, penguatan budidaya rumput laut, pertumbuhan tambak udang intensif, dan meningkatnya arus investasi sektor wisata bahari. Namun di sisi lain, proses

transformasi ekonomi tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi kesejahteraan masyarakat pesisir yang inklusif. Data longitudinal berbagai penelitian, laporan pemerintah daerah, statistik BPS, serta publikasi akademik mengenai ekonomi pesisir memperlihatkan bahwa peningkatan nilai ekonomi sektor kelautan masih didominasi oleh pola ekstraksi komoditas primer dengan keterbatasan hilirisasi dan lemahnya distribusi nilai tambah di tingkat rumah tangga nelayan. Dalam konteks tersebut, kesejahteraan masyarakat pesisir di Bima dan Dompu tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya produksi ekonomi, tetapi sangat ditentukan oleh struktur tata kelola ekonomi biru, akses terhadap rantai nilai, kapasitas kelembagaan lokal, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kebijakan sosial-ekonomi secara lintas sektor.

Secara empiris, perkembangan indikator kesejahteraan masyarakat pesisir menunjukkan tren yang fluktuatif sepanjang periode 2021-2025. Meskipun terdapat pertumbuhan pada sektor ekonomi kelautan, tingkat kemiskinan pesisir masih berada pada posisi yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata kawasan non-pesisir. Berbagai studi pembangunan maritim di kawasan Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa rumah tangga nelayan tradisional di Bima dan Dompu masih menghadapi kerentanan multidimensional berupa ketidakstabilan pendapatan, rendahnya akses pembiayaan produktif, keterbatasan teknologi penangkapan, dan tingginya ketergantungan pada tengkulak. Kondisi tersebut diperparah oleh pola perdagangan hasil laut yang masih bersifat oligopolistik, sehingga nelayan lokal hanya memperoleh margin ekonomi yang rendah dari rantai distribusi komoditas laut. Dengan demikian, pertumbuhan sektor kelautan belum sepenuhnya menghasilkan redistribusi kesejahteraan yang merata pada komunitas pesisir.

Analisis terhadap perkembangan pendapatan rumah tangga pesisir menunjukkan adanya peningkatan nominal pendapatan selama lima tahun terakhir, namun kenaikan tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas ekonomi riil masyarakat. Inflasi bahan pokok, biaya operasional melaut, serta ketergantungan pada bahan bakar menyebabkan kenaikan pendapatan nelayan bersifat semu. Dalam beberapa penelitian lapangan di wilayah Teluk Bima, Sape, Woha, Kempo, dan Pajo, ditemukan bahwa mayoritas nelayan skala kecil mengalami penurunan kemampuan tabungan rumah tangga akibat volatilitas harga ikan dan ketidakpastian cuaca ekstrem. Selain itu, modernisasi alat tangkap justru lebih banyak dinikmati kelompok pemodal besar dibanding nelayan tradisional. Akibatnya, transformasi ekonomi biru pada tingkat lokal memperlihatkan gejala dualisme ekonomi pesisir, di mana pertumbuhan sektor kelautan terkonsentrasi pada aktor tertentu sementara kelompok masyarakat pesisir tradisional tetap berada dalam struktur ekonomi rentan.

Fenomena tersebut semakin terlihat ketika indikator kesejahteraan dianalisis melalui pendekatan akses layanan dasar. Meskipun pemerintah daerah telah meningkatkan berbagai program pemberdayaan masyarakat pesisir, kualitas akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan infrastruktur ekonomi di desa-desa pesisir masih menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan. Beberapa kawasan pesisir di Kabupaten Bima bagian timur dan wilayah pesisir Dompu selatan masih menghadapi keterbatasan fasilitas penyimpanan hasil laut, akses jalan distribusi, serta minimnya

sentra pengolahan hasil perikanan. Ketidakmerataan infrastruktur tersebut berdampak langsung terhadap rendahnya efisiensi ekonomi masyarakat pesisir. Dalam perspektif ekonomi biru, kondisi ini menandakan bahwa pembangunan sektor kelautan belum sepenuhnya diintegrasikan dengan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat secara komprehensif.

Selain faktor struktural ekonomi, dimensi kerentanan ekologis juga memberikan pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Intensitas perubahan iklim, abrasi pantai, ketidakpastian musim tangkap, dan penurunan kualitas ekosistem pesisir menyebabkan produktivitas ekonomi masyarakat nelayan mengalami tekanan yang semakin tinggi. Berbagai hasil penelitian kelautan menunjukkan bahwa perubahan pola arus laut dan cuaca ekstrem selama lima tahun terakhir berdampak pada penurunan hari melaut efektif di sejumlah wilayah pesisir Bima dan Dompu. Dalam kondisi tersebut, rumah tangga nelayan tradisional menjadi kelompok yang paling rentan karena tidak memiliki diversifikasi ekonomi yang memadai. Akibatnya, sebagian masyarakat pesisir terpaksa melakukan pekerjaan informal non-maritim dengan tingkat pendapatan yang rendah untuk mempertahankan keberlangsungan ekonomi rumah tangga.

Secara kelembagaan, tata kelola ekonomi biru di Bima dan Dompu masih menghadapi persoalan koordinasi lintas sektor yang lemah. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir cenderung berjalan secara parsial antara sektor perikanan, pariwisata, koperasi, dan pengembangan UMKM. Akibatnya, intervensi kebijakan tidak menghasilkan integrasi rantai nilai ekonomi yang kuat. Dalam sejumlah evaluasi kebijakan daerah ditemukan bahwa sebagian besar program bantuan alat tangkap, budidaya, dan pengembangan wisata bahari belum disertai penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi nelayan, pusat distribusi hasil laut, dan skema perlindungan sosial adaptif. Hal ini menyebabkan masyarakat pesisir tetap berada dalam posisi subordinatif terhadap pasar dan aktor distribusi eksternal.

Di sisi lain, perkembangan sektor wisata bahari selama lima tahun terakhir memang memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal, khususnya pada kawasan Lakey Dompu, Teluk Saleh, dan sejumlah destinasi pesisir di Kabupaten Bima. Akan tetapi, manfaat ekonomi dari pertumbuhan pariwisata tersebut belum sepenuhnya terdistribusi secara adil kepada masyarakat lokal. Banyak penelitian menunjukkan bahwa struktur ekonomi wisata bahari masih didominasi oleh pelaku usaha eksternal dengan kapasitas modal lebih besar, sedangkan masyarakat pesisir hanya menempati posisi ekonomi informal berpendapatan rendah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa orientasi ekonomi biru di tingkat daerah masih lebih menekankan pertumbuhan ekonomi sektoral dibanding pembangunan kesejahteraan berbasis komunitas.

Ketimpangan distribusi manfaat ekonomi juga tercermin dalam perkembangan indikator kemiskinan pesisir selama periode penelitian. Walaupun angka kemiskinan daerah menunjukkan tren penurunan secara umum, penurunan tersebut berlangsung relatif lambat pada komunitas pesisir dibanding kawasan perkotaan. Tingkat ketergantungan terhadap sektor primer menyebabkan masyarakat pesisir sangat rentan terhadap fluktuasi pasar dan perubahan ekologi. Di Kabupaten Dompu, misalnya,

ekspansi tambak udang memang meningkatkan nilai produksi perikanan budidaya, tetapi tidak selalu berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan kecil karena sebagian besar investasi terkonsentrasi pada korporasi dan pemilik modal regional. Situasi serupa juga terlihat pada pengelolaan komoditas rumput laut yang masih menghadapi persoalan harga dan lemahnya kapasitas hilirisasi lokal.

Dalam perspektif ekonomi politik pembangunan, kondisi tersebut menunjukkan adanya disjungsi antara desain kebijakan ekonomi biru dengan realisasi kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah daerah pada dasarnya telah mengadopsi berbagai dokumen pembangunan yang menempatkan sektor kelautan sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, implementasi kebijakan masih cenderung berorientasi pada peningkatan produksi dan investasi, bukan pada penguatan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Akibatnya, pembangunan ekonomi biru lebih banyak menghasilkan pertumbuhan statistik sektoral dibanding transformasi kesejahteraan substantif. Dengan kata lain, keberhasilan ekonomi makro daerah belum mampu menghilangkan kerentanan mikro masyarakat pesisir.

Data perkembangan indikator kesejahteraan masyarakat pesisir Bima dan Dompu selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Bima dan Dompu (2021-2025)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Kelautan (%)	Persentase Kemiskinan Pesisir (%)	Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Nelayan (Rp/Bulan)	Tingkat Pengangguran Pesisir (%)	Indeks Infrastruktur Pesisir	Akses
2021	2,4	16,8	2.150.000	7,8	54	
2022	2,9	16,1	2.340.000	7,4	57	
2023	3,1	15,5	2.510.000	7,0	61	
2024	3,4	14,8	2.760.000	6,7	65	
2025	3,7	14,2	2.980.000	6,3	69	

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi kelautan mengalami peningkatan secara gradual, namun penurunan kemiskinan berlangsung lebih lambat dibanding peningkatan performa ekonomi sektoral. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa mekanisme distribusi manfaat ekonomi belum bekerja secara optimal pada level masyarakat pesisir. Peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan juga tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan daya beli riil karena dipengaruhi oleh kenaikan biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan demikian, indikator kesejahteraan masyarakat pesisir memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi biru masih menghadapi tantangan serius dalam mentransformasikan pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berikut adalah tabel perkembangan indikator kesejahteraan masyarakat pesisir menunjukkan pola pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibanding penurunan tingkat kemiskinan.

Tabel 3. Tren Pertumbuhan Ekonomi Kelautan dan Kemiskinan Pesisir 2021-2025

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Kemiskinan Pesisir (%)
2021	2,4	16,8
2022	2,9	16,1
2023	3,1	15,5
2024	3,4	14,8
2025	3,7	14,2

Ketimpangan laju perubahan kedua indikator tersebut menegaskan bahwa tata kelola ekonomi biru daerah masih menghadapi persoalan struktural pada aspek distribusi manfaat ekonomi. Secara teoritis, ekonomi biru seharusnya mampu menciptakan integrasi antara pertumbuhan ekonomi, konservasi sumber daya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, realitas di Bima dan Dompu memperlihatkan bahwa orientasi pembangunan masih dominan bertumpu pada eksploitasi sumber daya dan peningkatan output produksi. Kondisi ini menghasilkan apa yang dalam ekonomi pembangunan disebut sebagai *enclave growth*, yakni pertumbuhan ekonomi yang tidak sepenuhnya terhubung dengan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat lokal.

Lebih jauh lagi, analisis terhadap realisasi kesejahteraan masyarakat pesisir menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi biru tidak dapat hanya diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi daerah atau peningkatan nilai produksi sektor kelautan. Dimensi kesejahteraan masyarakat pesisir memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup distribusi pendapatan, akses terhadap layanan dasar, perlindungan sosial, stabilitas pekerjaan, resiliensi ekologis, dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal. Dalam konteks Bima dan Dompu, tantangan utama bukan terletak pada keterbatasan sumber daya kelautan, melainkan pada lemahnya kemampuan tata kelola daerah dalam mengorkestrasi potensi ekonomi menjadi kesejahteraan yang berkeadilan. Oleh karena itu, realisasi kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi indikator paling penting untuk menilai efektivitas ekonomi biru sebagai paradigma pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola ekonomi biru di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu masih mengalami disjungsi struktural antara desain kebijakan, performa ekonomi sektoral, dan realisasi kesejahteraan masyarakat pesisir. Meskipun sektor kelautan dan perikanan menunjukkan kontribusi dominan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta mengalami peningkatan produktivitas selama periode 2021–2025, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan distribusi manfaat ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial. Struktur ekonomi pesisir masih terjebak pada pola ekstraktivisme primer, lemahnya hilirisasi, rendahnya integrasi rantai nilai lokal, serta dominasi aktor eksternal dalam distribusi keuntungan ekonomi maritim. Pada saat yang sama, masyarakat pesisir tetap menghadapi kerentanan multidimensional berupa kemiskinan struktural, keterbatasan akses infrastruktur, rendahnya kapasitas kelembagaan ekonomi lokal, dan tingginya tekanan ekologis akibat perubahan iklim. Dengan demikian, efektivitas ekonomi biru daerah tidak ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi semata, melainkan oleh kemampuan tata kelola daerah

dalam mentransformasikan potensi kelautan menjadi sistem pembangunan pesisir yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan.

Referensi

- Abdau, A. A., & Nadir, S. (2021). *Evaluation of the Implementation of Barru Regency Regional Regulation No. 7 of 2021 in a Blue Economy Perspective* (Vol. 2025, Issue 7). Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-545-4>
- Abukalloub, A., & Güngör, A. (2026). *Blue Economy and Sustainable Development: A Comparative Analysis of International Models and Türkiye ' s Governance Capacity*. 4(2), 520–534.
- Andana, F., & Saputra, C. F. W. B. (2025). Regional Policy Diversification to Maximize Blue Economy Potential in Kepulauan Riau Amid Indonesia-China Bilateral Cooperation. *Journal of Maritime Policy Science*, 2(1), 13–25. <https://doi.org/10.31629/jmps.v2i1.7165>
- Benzaken, D., Voyer, M., Pouponneau, A., & Hanich, Q. (2022). Good governance for sustainable blue economy in small islands: Lessons learned from the Seychelles experience. *Frontiers in Political Science*, 4. <https://doi.org/10.3389/fpos.2022.1040318>
- Evans, L. S., Buchan, P. M., Fortnam, M., Honig, M., & Heaps, L. (2023). Corrigendum: Putting coastal communities at the center of a sustainable blue economy: A review of risks, opportunities, and strategies (Frontiers in Political Science, (2023), 4, (1032204), 10.3389/fpos.2022.1032204). *Frontiers in Political Science*, 5. <https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1182415>
- Garland, M., Axon, S., Graziano, M., Morrissey, J., & Heidkamp, C. P. (2019). The blue economy: Identifying geographic concepts and sensitivities. *Geography Compass*, 13(7), 1–21. <https://doi.org/10.1111/gec3.12445>
- Haeril, H., Mas'ud, M., Iradat, T., & Hendra, H. (2021). Penerapan Kebijakan Mitigasi Bencana (Fisik dan Nonfisik) dalam Mengurangi Risiko Bencana di Kabupaten Bima. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(1), 23–47. <https://doi.org/10.47650/jglp.v3i1.179>
- Hajar, S., Ramlan, & Kholik, K. (2025). Why is adaptive policy important in geosite governance as an effort to realize sustainable tourism in the Toba Caldera Geopark area of Samosir regency? *Frontiers in Political Science*, 7(December), 1–16. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1713478>
- Hendra, H., Nur, M., Haeril, H., Junaidin, J., & Wahyuli, S. (2023). Strategi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Pesisir. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(1), 72–80. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i1.16880>
- Journal, I. I., & Economics, S. (2026). *ANALYSIS OF DETERMINANTS OF OPEN UNEMPLOYMENT IN NORTH*. 9(1), 3550–3561.
- Kusmayadi, D. A., & Padjajaran, U. (2026). *PROBLEM TREE DAN 5 WHYS UNTUK IDENTIFIKASI AKAR MASALAH PROGRAM PERIKANAN TANGKAP PANGANDARAN*. 13, 247–262.
- Lakat, J. S., Rotinsulu, T. O., Kumenaung, A. G., Lengkong, P. K., Gamaliel, H., & Klabat, U. (2025). *Integrasi Ekonomi Biru dalam Penganggaran Daerah Sulawesi Utara*:

- Analisis Manajemen Keuangan Publik Berbasis Blue Finance*. 04(2), 242–253.
- Makmur, K., Sugianto, D. N., Yonvitner, Damanik, R., Noor, R., Lestari, I., Marzuki, F. R., Putra, R. D., Aryanti, D., Handayani, E. P., Lesdantina, D., Adrianto, L., Muawanah, U., & Fariza, F. (2022). Prospek Ekonomi Biru bagi Pemulihan Ekonomi Indonesia. In *Suparyanto dan Rosad* (2015 (Vol. 5, Issue 3).
- Murphy, G. E. (2007). An abstract of the dissertation of. *October, October*, 302.
- Nations, U., & Development, I. (n.d.). *Compendium of Background Papers*.
- Okafor-Yarwood, I., Kadagi, N. I., Miranda, N. A. F., Uku, J., Elegbede, I. O., & Adewumi, I. J. (2020). The blue economy-cultural livelihood-ecosystem conservation triangle: The African experience. *Frontiers in Marine Science*, 7(July), 1–18. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00586>
- Rifai, R., & Haeril, H. (2024). Integrasi Kebijakan Publik dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Pesisir di Kabupaten Bima. *Journal of Governance and Local Politics* ..., 6(1), 25–36. <https://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/1235>
- Sarker, S., Bhuyan, M. A. H., Rahman, M. M., Islam, M. A., Hossain, M. S., Basak, S. C., & Islam, M. M. (2018). From science to action: Exploring the potentials of Blue Economy for enhancing economic sustainability in Bangladesh. *Ocean and Coastal Management*, 157(March), 180–192. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.03.001>
- Voyer, M., Farmery, A. K., Kajlich, L., Vachette, A., & Quirk, G. (2020). Assessing policy coherence and coordination in the sustainable development of a Blue Economy. A case study from Timor Leste. *Ocean and Coastal Management*, 192(November 2019). <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105187>
- Wenhai, L., Cusack, C., Baker, M., Tao, W., Mingbao, C., Paige, K., Xiaofan, Z., Levin, L., Escobar, E., Amon, D., Yue, Y., Reitz, A., Sepp Neves, A. A., O'Rourke, E., Mannarini, G., Pearlman, J., Tinker, J., Horsburgh, K. J., Lehodey, P., ... Yufeng, Y. (2019). Successful blue economy examples with an emphasis on international perspectives. *Frontiers in Marine Science*, 6(JUN), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00261>
- Wuwung, L., Croft, F., Benzaken, D., Azmi, K., Goodman, C., Rambourg, C., & Voyer, M. (2022). Global blue economy governance – A methodological approach to investigating blue economy implementation. *Frontiers in Marine Science*, 9(November), 1–17. <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.1043881>
- Yang, C., Wang, P., Li, R., & Zhang, M. (2025). Research on performance evaluation of ecological product value realization under the “Dual Carbon Goals.” *Frontiers in Environmental Economics*, 4(August). <https://doi.org/10.3389/frevc.2025.1563591>